

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Tenggarong, setelah adanya kebijakan terkait dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disahkan melalui Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, dimana untuk wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat perubahan yaitu adanya beberapa wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.

Sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki slogan “Kukar Idaman” yang bergerak meningkatkan pembangunan dari berbagai aspek seperti konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan, pengembangan pertanian, serta program sanitasi. Pada poin ke empat misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah” yang mana pada misi tersebut tentu selaras terkait dengan adanya keterhubungan antar wilayah dan perkembangan transportasi serta layanan transportasi, yang mana isu-isu strategis tersebut nantinya yang akan ditangani dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, pada poin ketiga minimnya ketersediaan pelayanan angkutan penumpang umum yang mana layanan tersebut berkaitan dengan kemudahan akses menuju wilayah tersebut serta adanya layanan transportasi.

Kecamatan Tabang merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam zona hulu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan Tabang memiliki luas wilayah

mencapai 7.764,51 km² dan dengan ketinggian sekitar 32 meter dari permukaan laut, dengan jumlah penduduk saat ini yaitu 14.373 orang yang tersebar di 19 desa, dengan Desa Sidomulyo merupakan pusat kegiatan pemerintahan. Berdasarkan data yang ada, Kecamatan Tabang bergantung pada sektor pertanian yaitu pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Kecamatan Tabang Dalam Angka 2023). Pada sektor pariwisata Kecamatan Tabang perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan kabupaten.

Kecamatan Tabang merupakan daerah yang dapat dikatakan terisolasi karena keterbatasan akses transportasi dan keterbatasan komunikasi, sehingga aksesibilitas menuju daerah tersebut terbatas atau sulit dan memiliki lokasi jauh dari pusat ibu kota kabupaten yaitu Kota Tenggarong dengan jarak tempuh sekitar 245 km. Jika dilihat dari ketersediaan layanan angkutan umum yang melayani Kecamatan Tabang saat ini belum tersedianya layanan angkutan umum, sehingga masyarakat Tabang kesulitan dalam melakukan perjalanan.

Kecamatan Tabang karena merupakan daerah yang dapat dikatakan terisolasi tentu barang – barang kebutuhan pokok masyarakat harus didatangkan dari kota, sehingga harga barang kebutuhan tersebut akan lebih mahal jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh biaya pengiriman barang atau proses distribusi barang yang tidak sedikit untuk mencapai Kecamatan Tabang.

Sementara itu kondisi eksisting angkutan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini tidak adanya angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan, hanya dilayani oleh angkutan perintis dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan melihat kondisi eksisting dari angkutan perintis yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini khususnya layanan angkutan perintis dengan rute Samarinda – Kembang Janggut yang ada, karena melihat kondisi eksisting tersebut maka perlu adanya kajian terhadap pengembangan layanan terkait angkutan perintis tersebut agar dapat melayani sampai dengan Kecamatan Tabang.

Kecamatan Tabang perlu dilayani oleh angkutan perintis dikarenakan untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pada saat ini kendaraan yang digunakan oleh masyarakat yaitu kendaraan pribadi dan *travel*, yang mana biaya dalam satu kali melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dan *travel* cukup mahal yaitu sekitar Rp350.000,00 – Rp500.000,00 dan belum lagi termasuk biaya tambahan terkait barang bawaan. Karena lokasinya yang dapat dikategorikan terisolir dan terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara serta daerah terbangun lainnya, seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan terlebih sebagai mitra dari Ibu Kota Nusantara yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dari itu hal ini untuk menunjang mobilitas serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan angkutan umum. Adanya layanan angkutan perintis yang dioperasikan oleh PERUM DAMRI saat ini yang melayani rute Samarinda - Kembang Janggut yang mana Kecamatan Kembang Janggut merupakan kecamatan satu – satunya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tabang. Maka dari itu diperlukan kajian terhadap pengembangan layanan angkutan perintis tersebut agar dapat melayani di Kecamatan Tabang.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **STUDI PENGEMBANGAN LAYANAN ANGKUTAN PERINTIS KECAMATAN TABANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada dan dengan melihat kondisi eksisting saat ini, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah khusus dibidang angkutan umum pada pelayanan angkutan yang ada di Kecamatan Tabang di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Belum tersedianya layanan angkutan umum yang melayani Kecamatan Tabang.

2. Tingginya biaya perjalanan masyarakat Tabang untuk menuju Ibu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara dan kota sekitarnya.
3. Kecamatan Tabang masih tergolong kecamatan yang terisolasi.
4. Jarak yang jauh dari Kecamatan Tabang menuju pusat ekonomi, Ibu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara dan kota terbangun lainnya yang menyebabkan mahalnya barang – barang kebutuhan pokok.
5. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi terhadap mobilitas masyarakat Tabang.

1.3. Rumusan Masalah

Melalui pemaparan diatas didapatkan rumusan masalah dari penelitian ini berupa:

1. Berapa permintaan potensial terhadap angkutan jalan perintis?
2. Berapa besar tarif serta biaya subsidi yang diterapkan dari pengembangan layanan angkutan jalan perintis?
3. Bagaimana penentuan titik henti dan desain fasilitas henti angkutan jalan perintis di Kecamatan Tabang?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan penelitian adalah untuk melakukan kajian terhadap pengembangan layanan angkutan jalan perintis yang nantinya dapat dioperasikan di Kecamatan Tabang yang mana dalam hal ini penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam mengatasi terkait kesulitan masyarakat Tabang terhadap aksesibilitas layanan angkutan umum dan memudahkan mobilitas masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju kecamatan lain atau keluar Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis jumlah permintaan potensial masyarakat Tabang terhadap layanan angkutan jalan perintis.
2. Menghitung besaran tarif serta subsidi yang akan diterapkan dari pengembangan layanan angkutan jalan perintis.
3. Menentukan titik – titik henti dan membuat usulan desain halte untuk angkutan perintis.

1.5. Ruang Lingkup

Untuk menjaga penelitian yang dilakukan agar tetap konsisten terhadap tujuan penelitian dan menghindari pembahasan permasalahan yang meluas maka ruang lingkup pembahasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tabang.
2. Penelitian hanya mencakup tentang bagaimana perhitungan permintaan angkutan perintis, perhitungan biaya operasional kendaraan, tarif, kemampuan dan kemauan masyarakat, serta mekanisme perhitungan subsidi.
3. Perhitungan permintaan angkutan perintis berdasarkan hasil survei wawancara *stated preference* dan tanpa mencari faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan moda transportasi.
4. Dalam penentuan jenis kendaraan yang digunakan yaitu bus sedang, karena penelitian ini bersifat melanjutkan sistem operasional yang sudah ada saat ini.
5. Penulis hanya membuat desain dan tidak termasuk perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam pengadaan halte dan prasarana lainnya.